

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF GUNA  
MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

*PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING TO REALIZE  
COMMUNITY ASPIRATIONS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING  
AGENCY OF MUSI BANYUASIN REGENCY*

**Ridwan<sup>1</sup>, Juwandi Panab<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan  
Email: ridwan@ipdn.ac.id

**ABSTRAK**

Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat adalah pembangunan yang bersifat universal diberbagai sektor kehidupan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang masif dan intensif antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang kreatif dan intensif yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan faktor penghambat serta pendukung partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan keadaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan Analisis data dengan menggunakan teori perencanaan pembangunan partisipatif oleh *McGee* yang meliputi dimensi dimensi sebagai berikut: *actors*, *knowledge* dan *spaces*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemerintah telah memberikan tugas kepada kecamatan dan desa untuk segera menyiapkan pelaksanaan musrenbang tahunan dan segera disosialisasikan kepada masyarakat. Program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala berupa pendanaan dalam proses penyelenggaraan kegiatan.

**Kata Kunci :** pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunan

**ABSTRACT**

*Development that prospers the community is development that is universal in all sectors of the social life of society. To achieve development goals, massive and intensive cooperation and collaboration between the government and the community is needed. Creative and intensive collaboration carried out in Musi Banyuasin Regency by conducting Development Planning Consultations or Musrenbang. Musrenbang is a policy-making process involving active community participation in channeling their aspirations. This research was conducted to identify community participation in policy making and the inhibiting and supporting factors of community participation. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach that describes the state of community participation in development. This study uses data analysis using participatory development planning theory by McGee which includes the following dimensions: Actors (People), Knowledge (Knowledge) and Spaces (Space). Based on the results of the research, to build community participation in development the Government has assigned sub-districts and villages to immediately prepare the implementation of the annual musrenbang and immediately socialize it to the community. The program has been running well, but there are obstacles in the form of funding in the process of organizing activities.*

**Keywords:** government, community participation, development

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan secara sadar oleh suatu negara untuk mencapai sebuah keadaan dan situasi yang lebih baik dari sebelumnya, dengan terencana dan terarah guna pembinaan pada bangsa. Negara Indonesia, saat ini, tengah semarak dalam pelaksanaan pembangunan yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini dalam mendukung tujuan Bangsa Indonesia yang dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuk kebijakan nasional dimana menyangkut adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang merupakan peluang kepada seluruh pemerintah daerah khususnya kabupaten kota untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi, kemampuan, karakteristik masing masing daerah yang bersangkutan.

Pentingnya peran masyarakat di Indonesia dalam pembangunan yang berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses demokrasi merupakan hasil masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan-masukan yang lebih dikenal dengan aspirasi masyarakat merupakan sebuah ide ataupun gagasan yang berpengaruh pada tahap pembangunan. Aspirasi masyarakat dalam pembangunan berfungsi dalam proses pembentukan pembuatan gagasan agar lebih terarah dan mengetahui perkembangan yang terjadi di wilayah masyarakat.

Pembangunan yang terarah pelaksanaannya memerlukan sebuah perencanaan yang

mampu mewujudkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan dimana perencanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh berbagai pihak penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat ataupun daerah.

Penyampaian aspirasi dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musrenbang menjadi wadah bagi berbagai pihak masyarakat untuk terlibat dalam sistem perencanaan dan anggaran pada pelaksanaan pembangunan. Proses pelaksanaan musrenbang dimulai dari Tingkat kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota atau Kabupaten, Tingkat Provinsi, hingga Tingkat Nasional.

Sama hal dengan daerah lainnya yang melaksanakan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang melakukan peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan musrenbang, untuk merangkum program masing-masing Daerah Kabupaten/Kota agar memiliki tujuan yang sama dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin yang terkendala untuk mewujudkan aspirasi oleh masyarakat dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah yang terjadi tiga tahun terakhir. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Jumlah Program yang Diajukan Masyarakat dan Diakomodir Dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2020**

No.	RKPD (tahun)	Total Usulan	Final RKPD (diakomodir)	Persentase
1.	2018	1.459	999	68,47%
2.	2019	1.699	839	49,38%
3.	2020	1.105	73	06,61%
<b>Total</b>		<b>4.263</b>	<b>1.911</b>	<b>44,82%</b>

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 sampai 2020 program yang diajukan hanya diakomodir 44,82% dari total usulan. Artinya, tiap tahun usulan dan program yang diakomodir pemerintah semakin menurun. Tujuan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaan Musyawarah perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat kabupaten yaitu menciptakan sinergitas rencana program-program pembangunan antarwilayahkecamatan, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintah, serta mewujudkan perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sehingga menjadi acuan bagi masyarakat karena menyangkut pada kebijakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, dimana masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam dinamika pembangunan (Kartasasmita, 1997; Handoyo, 1998).

Demikian pula, perlu dikemukakan disini bahwa perencanaan pembangunan yang baik perlu mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan

masyarakat. Oleh sebab itulah, pelaksanaan perencanaan pembangunan memerlukan peran masyarakat pada proses perencanaan pembangunan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan bagi wilayah masyarakat yang membutuhkan pembangunan (Zuhriansyah, 2013). Dikarenakan pembangunan itu sendiri merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dan dibantu oleh pihak pemerintah Hal ini perlu menjadi perhatian karena tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pentingnya interaksi unsur berbagai pihak masyarakat, pemerintah, dan swasta yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Serta dengan memiliki latar belakang dan pengetahuan yang berbeda hingga ruang yang diberikan dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan. Penulis kemukakan keikutsertaan masyarakat dalam program perencanaan pembangunan di Musrenbang Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2018–2020 pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2 Keikutsertaan Komponen Masyarakat Dalam MUSRENBANG Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2020**

No.	Komponen Masyarakat	Memenuhi Undangan MUSRENBANG Kabupaten		
		2018	2019	2020
1	Forkompinda Kabupaten Musi Banyuasin	15	14	11
2	Anggota DPRD	50	48	46
3	BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	2	2	2
4	Kepala OPD, BUMD, dan Non Departemen	73	75	73
5	Delegasi Kecamatan	21	2	20
6	Kelurahan	9	8	6
7	Unsur LSM, Asosiasi, Organisasi Wanita/ Profesi, Perbankan, dan Perguruan Tinggi	127	125	120
<b>Total</b>		<b>297</b>	<b>294</b>	<b>278</b>

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat ditunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dari berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan semakin rendah tiap tahunnya. Ada banyak aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan baik dari pihak pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta, dari keikutsertaan partisipasi para pelaku pelaksana perencanaan pembangunan, ada hubungan kekuasaan mengenai pengetahuan yang dibawa pada proses perencanaan pembangunan dalam mempertimbangkan metode yang digunakan untuk mengacu pada semua peluang yang mempengaruhi proses perencanaan. Oleh sebab itu, perlu dicari faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi oleh masyarakat dan berbagai pihak dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, dapat diketahui alasan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dikarenakan peran serta dan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat sangat mempengaruhi keberlangsungan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan pada daerah yang berkaitan pada prosesnya menggunakan empat pendekatan, pendekatan teknokratik melalui metode dan kerangka berpikir, pendekatan partisipatif dengan melibatkan *stakeholders*, pendekatan politis dengan menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang diselenggarakan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai aspirasi masyarakat dengan memperhatikan peran berbagai pihak masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif yang lebih memperhatikan kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi.

Oleh sebab itulah pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif sangat diperlukan. Artinya pendekatan perencanaan pembangunan akan sesuai harapan dari pemerintah dan

seluruh masyarakat di daerah tersebut dengan mengkombinasikan pendekatan *Top-Down dan Bottom-Up*. (Slamet, 2003; Soetrisno, 1995, Widodo, 2019). Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan cara dalam pencapaian pembangunan yang diharapkan masyarakat (Umar, 2004). Dimana semua *stakeholder* bersama-sama menentukan program pembangunan yang diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan pemerintah daerah mengarah pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Ndraha, 1990; Sastroputro, (1996). Perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan musrenbang sebagai tahapan penyusunan pada tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi (Harjanto, 2011).

Keterkaitan antara partisipasi masyarakat dengan peran pemerintah sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sangat berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan (Fung, 2006; Siagian, 1982, Deviyanti, 2013). Pada umumnya, kebanyakan orang menganggap bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan hanya mengenai tahap pembuat keputusan dan menikmati hasil dari pembangunan. Namun pada arti sesungguhnya partisipasi dalam pembangunan ialah mengambil peran dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, seperti berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan, memberi masukan dan saran berupa ide dari pemikiran, tenaga, keahlian, waktu, ataupun modal dana, kemudian ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya (Sumarto, 2003). Demikian dalam penerapan politik di Indonesia yang mengamanatkan pelaksanaan demokrasi masyarakat untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya pada proses perencanaan pembangunan. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin.

## METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis ingin memberi gambaran secara nyata dalam perilaku dan situasi lingkungan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung. Penelitian deskriptif memberikan gambaran mengenai sikap dan perilaku yang dialami selama penelitian. Pendekatan deskriptif ini tidak lain adalah metode yang berwujud nyata dan berawal dari fakta tinjauan pada pengamatan yang diteliti. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ialah meneliti berbagai hal yang mendeskripsikan atau menjelaskan secara spesifik keadaan objek, teknik dan sistem pemikiran, hubungan antar fenomena dan menghasilkan sebuah kesimpulan akhir yang bersifat umum (Cresswell, 2014).

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan sumber data Primer yang diperoleh secara langsung berupa data dokumen atau arsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa artikel ataupun literatur mengenai perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Musi Banyuasin

Analisis ini didasarkan pada data yang sudah ditarik melalui tiga teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah dijelaskan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perencanaan pembangunan partisipatif oleh McGee yang meliputi dimensi dimensi sebagai berikut: *Actors*, *Knowledge*, *Spaces*.

### Dimensi *Actors*

Dimensi *Actors* akan diukur dengan empat kriteria yaitu, kemauan politik penguasa dalam melibatkan masyarakat, percaya diri, pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan, dan kewenangan.

Kemauan politik dari pejabat pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai fasilitator kegiatan perencanaan pembangunan dalam melibatkan masyarakat untuk memberikan aspirasinya terhadap kebutuhan dan kepentingan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat terlihat pada pelaksanaan musrenbang yang telah melibatkan semua komponen pemangku kepentingan seperti masyarakat dan *stakeholders*, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan yang selalu dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Iskandar Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. “Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten, peran serta stakeholder dan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya yang merupakan tonggak keberhasilan tercapainya tujuan perencanaan pembangunan tersebut harus dilibatkan. Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sebagai pelayan publik dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang, mengingat fungsi pemerintah daerah yang hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan”

### Dimensi *Knowledge*

Dimensi *knowledge* tidak kalah penting dengan dimensi *actors* dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas mengenai pengetahuan berjalannya proses perencanaan pembangunan.

Dua pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh pelaksana proses perencanaan pembangunan dan *stakeholders* yang terlibat dalam musrenbang ialah mengenai bahan perencanaan yang bersifat formal seperti statistik, pengetahuan teknis, ilmu akademis baik pemerintahan maupun sosial politik, dan pengetahuan informal yang dimiliki oleh masyarakat berupa pengalaman. Kedua ialah pengetahuan mengenai peraturan atau prosedur perencanaan.

Proses perencanaan pembangunan yang membutuhkan berbagai pengetahuan dan pengalaman berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk ikut serta dalam berpartisipasi.

“Pada proses musrenbang pemerintah kabupaten telah memberikan tugas kepada kecamatan dan desa untuk segera menyiapkan pelaksanaan musrenbang tahunan dan segera disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan pramusrenbang bersama RW setempat yang mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk mengetahui keinginan dan aspirasi masyarakat tiap tahunnya, dan nanti saat pelaksanaan musrenbang berlangsung perwakilan pemda dari bappeda, DPRD Kabupaten Muba, Camat dan Kades ikut langsung dalam musyawarah di wilayah desa dan kecamatan.”

### **Dimensi Spaces**

Pada dimensi *Spaces* (ruang) terdapat empat kriteria yaitu memanfaatkan sumberdaya, kesempatan partisipasi, kondisi lingkungan, serta dana pembangunan. Dalam memanfaatkan sumberdaya pada perencanaan pembangunan untuk keberhasilan yang diinginkan, seorang perencana harus mampu untuk merumuskan perencanaan pembangunan

dari berbagai sektor sehingga dituntut memiliki SDM yang baik, yaitu pengetahuan dan wawasan luas dalam pembangunan. Pada pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pegawai yang berada di Bappeda dengan total pegawai sebanyak 73 orang telah memiliki kompetensi terkait perencanaan dengan memberikan pendidikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan dalam mengelola perencanaan. Disampaikan oleh sekretasi bappeda pada wawancara bersama penulis bahwa:

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan data dan informasi pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengelola SDM yang kompeten sebagai perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan. Namun pelatihan seringkali mengalami hambatan pada dana untuk terselenggaranya kegiatan. Karena SDM perencanaan pembangunan harus mampu merumuskan setiap sector dan potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Muba kita semua dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai dalam mendukung dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan agar setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M. F., Suprpto, S., dan Surati, S. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*, Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6(2), 135. , Gorontalo : Publik.
- Cresswell, J. W. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Unaited State of America: Sage.

- Deviyanti, D. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan*. e-Journal Administrasi Negara Vol 1 (2), 380-394. Makasar : PublikA
- Fung, A. 2006. *Varieties Of Participation Complex Governance*. Cambridge: Public Administration Review.
- Handoyo, B. H. C. 1998. *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Utusan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hardjanto, I. 2011. *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Hardianti, S., Muhammad, H., dan Lutfi, M. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa ( Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota )*. Tojo Una-Una: E Jurnal Katalogis, Vol 5(1), 120–126.
- Isbandi. 2007. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah*. EJournal Administrasi Negara, Vol 1(2), 27.
- Kartasasmita, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- McGee, R. 2002. *International Workshop On Participatory Planning Approaches For Local Governance*. Bandung: Logo Link.
- Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastropoetro. 1986. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, S.P. 1982. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Universitas Sebelas Maret Press.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi, Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Umar. (2004). *Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo. (2019). *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang ( Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati )*. Journal Of Public Policy And Management Review, Vol 5(4). Semarang : Universitas Diponegoro
- Zuhriansyah, M. 2013. *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*.